



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jl. Ahmad Yani No. 2 Langsa. Telp. 0641. 21409. Fax. 0641. 21408  
Website : [www.kppnlangsa.net](http://www.kppnlangsa.net). Email : [kppnlangsa@gmail.com](mailto:kppnlangsa@gmail.com)

Nomor : S-355/WPB.01/KP.0403/2018 02-04-2018  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Kpu Kabupaten Aceh Timur  
Di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Alue Nibong Peureulak

1. Dasar :

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-10226/PB/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengendalian UP/GUP/TUP pada Akhir Tahun Anggaran 2017.
  - Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2018 dari Kuasa Pengguna Anggaran Kpu Kabupaten Aceh Timur Nomor 205/KU.03.2-SR/04/1103/Sek-KAB/III/2018 tanggal 28-03-2018 tentang Tambahan Uang Persediaan.
- Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 4,533,164,800 (Empat milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja operasional Persiapan Pemilu 2019 yang diajukan Satuan Kerja Kpu Kabupaten Aceh Timur (655640) atas beban DIPA TA. 2018 Nomor 076.01.2.655640/2018 tanggal 05 Desember 2017.
  - Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (*revolving*).
  - Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
  - Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
  - Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor  
KEPALA  
KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA  
LANGSA  
MULIASYAH  
NIP. 196207151983031002

Tembusan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh